

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alfian, Malik, 2010, *Pengantar Bisnis Pelaksana Konstruksi*, C.V. Andi Offset; Yogyakarta.
- Asyiah, Noor, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020, *Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sleman 2021*, Pemerintah Kabupaten Sleman; Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
- Badan Pusat Statistik DIY, 2021 Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, 2020, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2020*, BPS Provinsi DIY, Yogyakarta,
- Berita Resmi Statistik, 2021, “Perkembangan Ekonomi DIY Triwulan IV-2020” Pertumbuhan Ekonomi DIY Triwulan IV-2020 No. 14/02/34/Th.XXIII, 5 Februari 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta
- Diantha, I Made Pasek, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup; Jakarta,
- Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, 2020, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2019, DPUPKP, Sleman,
- Fitri, M Rahmadana dkk. 2020, *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis; Medan.
- Hansen Seng, 2017, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hardiyansyah, 2018, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta.
- Hardiyansyah, 2015, *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*. Gava Media, Yogyakarta.

Koentjoro, Diana Halim, 2001, *Hukum Adminitstrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran*, UII Press; Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Nasution, S, 2006, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara; Jakarta.

Nazir Muhammad, 1988, *Metode Penelitian* Ghalia Indonesia; Jakarta.

Qamar Nurul, Dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Politic Social Genius, Makasar.

Rachenjantono, Edy MM, 2008, *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Repupblik Indonesia.

Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.

Soekanto, Soejono, H Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta; Jakarta.

Soekanto, Soejono, Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers; Jakarta.

Soekanto, Soejono, Mamudji, Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta.

Sumitro, Ronny Hanitiyo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia; Jakarta.

2. Artikel Jurnal

Elviandri, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia” *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019.

Achmad Sodik Sudrajat “Konsep dan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah” *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume VII, Nomor 3, Semptember 2010

3. Internet

Abdul Hamid Razaq, “9 Proyek Strategis di Sleman Tahun Depan Mulai
Disiapkan, Ini Daftarnya”

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/30/512/1030574/9-proyek-strategis-di-sleman-tahun-depan-mulai-disiapkan-ini-daftarnya> diakses pada 30 November 2020

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “KBBI Daring: Pelayanan”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayanan> diakses pada 8 Maret 2021

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “KBBI Daring: Pengawasan”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> diakses pada 8 Maret 2021

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “KBBI Daring: Publik”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/publik> diakses pada 8 Maret 2021

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia “KBBI Daring: Kendala”,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendaala> diakses pada 30 Juni 2021.

Constructiontuts, Editorial Teams, “Construction Industry Overview”
<https://www.constructiontuts.com/construction-industry/> diakses pada 24 Juni 2021

Designing buildings,”Service”, <https://www.designingbuildings.co.uk/>
diakses pada 24 Juni 2021

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, “Sejarah DPUPKP”,
<https://dinpupkp.slemankab.go.id/sejarah> diakses 22 Februari 2021,

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, “Visi Misi DPUPKP”
<http://dinpupkp.slemankab.go.id/visi-dan-misi>

Iskandar D.P., S.H. 2017 3 “Hal Penting Seputar Usaha Jasa Konstruksi Yang Wajib Dipahami” <https://bplawyers.co.id/2017/08/18/3-hal-penting-seputar-usaha-jasa-konstruksi-yang-wajib-dipahami/>

diakses pada 28 Desember 2020

Merriam-Webster “Public Service” [https:// www.merriam-webster.com /dictionary/ public%20 service](https://www.merriam-webster.com/dictionary/public%20service) diakses pada 28 Juni 2021 pukul

23.11 WIB

Oxford University Press “Oxford Learner Dictionaries: Supervision”, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/supervision?q=supervision> diakses pada 8 Maret 2021

Paul Spicker, 2009, “The Nature of Public Service”, *International Journal of Public Administration* 2009, hlm. 4, <http://openair.rgu.ac.uk> diakses pada 28 Juni 2021

Pemkab Sleman: Berita, “Sleman Targetkan Sembilan Proyek Strategis di Tahun 2021” <http://www.slemankab.go.id/16058/sleman-targetkan-sembilan-proyek-strategis-di-tahun-2021.slm#:~:text=Sri%20Purnomo%20menjelaskan%20pembangunan%20kesembilan,pelebaran%20ruas%20jalan%20jembatan%20Grembayangan%2C> diakses pada 30 November 2020

Pengadaan Web.Id: Pengertian, Fungsi dan Jenis-jenis Pengawasan (Controlling), <https://www.pengadaan.web.id/2017/12/pengertian-fungsi-dan-jenis-jenis-pengawasan.html>. Diakses 23 Maret 2021

Prabu Kresno, Kumparan, “Bisnis: Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah”, <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>, diakses pada 8 Maret 2021

Vault, Construction “Overview”, [https://www.vault.com/industries-professions/industries/ construction](https://www.vault.com/industries-professions/industries/construction), diakses pada 24 Juni 2021

4. Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 306);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 285);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 544);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/Prt/M/2019 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/Prt/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 09/PER/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

Surat Edaran Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Surat Edaran Nomor: 02/SE/M/2021/SE/M/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792 /KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 76/KPTS/M/2020 tentang Komite Keselamatan Konstruksi;

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111);

Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 61).